

**GARI PRENUER: INSTITUSIONALISASI UMKM KALURAHAN GARI
(PENGABDIAN DI KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DIY)**

Mohamad Firdaus*, Minardi, Analius Giawa

Afiliasi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

*Korespondensi Penulis: Mohamadfirdaus11@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat di Kalurahan Gari ini bertujuan memperkuat kelembagaan UMKM menuju penetapan sebagai Desa Preneur, yang merupakan bagian dari sinergi program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di DIY. Kegiatan diawali dengan pemetaan potensi UMKM di delapan padukuhan, menghasilkan 492 UMKM teridentifikasi dan terdaftar di aplikasi SIBAKUL DIY sebagai upaya digitalisasi pemasaran. Selanjutnya, dilakukan penyusunan kajian kelembagaan yang memuat potensi, kendala, dan strategi penguatan, disertai pendampingan administrasi untuk pengajuan SK Desa Preneur ke Lurah dan rekomendasi ke Dinas Koperasi dan UMKM Gunungkidul. Pelatihan manajemen usaha dan FGD difokuskan pada penguatan kapasitas pengurus, branding produk, dan strategi pemasaran. Metode pelaksanaan mencakup ceramah, diskusi, role playing, serta evaluasi berbasis kuesioner. Hasilnya menunjukkan peningkatan koordinasi kelembagaan dan kesiapan administratif, meskipun masih terdapat kendala seperti rendahnya kapasitas manajerial, koordinasi antar pelaku, dan belum optimalnya peran kelembagaan ekonomi desa. Pengabdian ini merekomendasikan tindak lanjut berupa perumusan proposal jenis Desa Preneur berbasis UMKM aktif dan peningkatan regulasi internal untuk mendukung keberlanjutan program.

Kata Kunci: Pengabdian, Desa Preneur, Kalurahan Gari

ABSTRACT

This community service program in Gari Village aims to strengthen MSME institutions in preparation for designation as a Desa Preneur, aligned with the synergy of the Kalurahan Mandiri Budaya program in Yogyakarta Special Region. The activities began with mapping the potential of MSMEs across eight hamlets, resulting in the identification and registration of 492 MSMEs on the SIBAKUL DIY application as part of digital marketing efforts. Subsequently, an institutional study was prepared, outlining potentials, challenges, and strengthening strategies, accompanied by administrative assistance for the submission of the Desa Preneur decree to the village head and recommendation to the Gunungkidul Office of Cooperatives and MSMEs. Training sessions and focus group discussions focused on enhancing managerial capacity, product branding, and marketing strategies. The implementation methods included lectures, discussions, role-playing, and questionnaire-based evaluations. The results show improved institutional coordination and administrative readiness, although challenges remain, such as limited managerial capacity, weak coordination among stakeholders, and the suboptimal role of village economic institutions. This program recommends follow-up actions, including the formulation of a Desa Preneur proposal based on active MSMEs and the development of internal regulations to ensure program sustainability.

Keyword: Community Service, Desa Preneur, Gari Village.

Informasi Artikel: Submit: 10-11-2025 Revisi: 25-11-2025 Diterima: 24-12-2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi bentuk keseriusan dalam mengembangkan desa dan mencari solusi atas masalah-masalah yang ada melalui potensi yang dimiliki desa. Hakikat pengabdian adalah sebuah panggilan jiwa yang tidak mengharapkan sebuah imbal hasil dalam bentuk apapun terutama ingin mendapatkan hasil atau output yang baik dengan rencana yang telah ditetapkan dalam pengembangan desa. Setelah melakukan pengabdian di Periode sebelumnya yakni membuat peta potensi dan masterplan bekerjasama dengan Bumdesa Mardi Gemi Gari, kemudian pengabdian berlanjut dengan mengupayakan pendaftaran Kalurahan Gari ke Desa Prima. Pengabdian ini bertujuan untuk melanjutkan capaian keberhasilan Kalurahan Gari untuk menjadi Desa Preneur. Pada pengabdian pertama peran Bumdes dimaksimalkan menuju desa wisata budaya, dan pada pengabdian periode ini akan lebih memfokuskan untuk pendampingan menuju desa Preneur. Maksud Pembentukan Desa Preneur adalah mendorong terwujudnya desa yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan dinamika wirausaha ekonomi berbasis potensi dan kearifan lokal diperlukan unit usaha dengan pengelolaan berkualitas global melalui penguatan kapasitas komunitas masyarakat secara berkelanjutan.

Desa Preneur adalah salah satu syarat untuk menjadi desa mandiri Budaya, dimana fenomena status sebagai Desa Mandiri Budaya menjadi salah satu hal yang dikejar oleh banyak kalurahan di DIY tidak terkecuali di Gunungkidul. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sendiri diartikan sebagai desa/kalurahan yang mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam kehidupan dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam kebhinnekatunggalikaan. Dimana Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Dapat dilihat sesuai bagan dibawah ini:



Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Jumlah Desa Mandiri Budaya terus meningkat dari 10 desa pada tahun 2017-2020 menjadi 18 desa di tahun 2021. Pada tahun 2022 sudah ditetapkan 7 desa mandiri budaya, sehingga menjadi 25 desa mandiri budaya, dan di tahun 2023 ditambah 7 desa mandiri budaya menjadi 32 desa yang memiliki status desa mandiri budaya.

No	Desa/ Kalurahan	Kabupaten	Peringkat
Penetapan tahun 2020			
1	Bejiharjo	Gunungkidul	Utama
2	Pagerharjo	Kulonprogo	Utama
3	Putat	Gunungkidul	Utama
4	Pandowoharjo	Sleman	Utama
5	Girikerto	Sleman	Utama
6	Wedomartani	Sleman	Utama
7	Sabdodadi	Bantul	Utama
8	Jatimulyo	Kulonprogo	Madya
9	Margodadi	Sleman	Madya
10	Bangunkerto	Sleman	Madya
Penetapan tahun 2021			
1	Tuksono	Kulonprogo	Utama
2	Banjarharjo	Kulonprogo	Madya
3	Jerukwudel	Gunungkidul	Madya
4	Tanjungharjo	Kulonprogo	Madya
5	Hargomulyo	Kulonprogo	Madya
6	Bangunjiwo	Bantul	Madya
7	Giring	Gunungkidul	Madya
8	Glagah	Kulonprogo	Madya
Penetapan tahun 2022			
1	Panggungharjo	Bantul	Utama
2	Gilangharjo	Bantul	Utama
3	Kemadang	Gunungkidul	Utama
4	Sinduharjo	Sleman	Utama
5	Sendangmulyo	Sleman	Utama

6	Semanu	Gunungkidul	Utama
7	Trimurti	Bantul	Utama
Penetapan tahun 2023			
1	Mulyodadi	Bantul	Utama
2	Kepek	Gunungkidul	Utama
3	Srigading	Bantul	Madya
4	Katongan	Gunungkidul	Madya
5	Argomulyo	Sleman	Madya
6	Giripurwo	Gunungkidul	Madya
7	Sidorejo	Kulonprogo	Madya

Sumber: Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda DIY, 2024 (diolah)

Desa Preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Lembaga ekonomi desa, seperti : UMKM, koperasi, hingga BUMDES harus terlibat aktif. Mereka dapat membentuk konsorsium bagi pemasaran bersama barang dan jasa yang diproduksi warga. Strategi pemasaran diarahkan pada pembentukan sekaligus penguatan branding produk barang atau jasa yang potensial desa. Dalam menuju Desa Preneur pemetaan Potensu UMKM menjadu hal yang sangat penting. Pemetaan potensi usaha desa seperti:

Serving: kelompok wirausaha menjalankan "bisnis sosial" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat contoh jenis usaha Serving yaitu usaha budidaya ikan, usaha penggilingan padi, usaha jasa buruh tanam/panen, usaha brigade semprot hama, usaha listrik desa, lumbung pangan, dll.

Banking: kelompok wirausaha menjalankan "bisnis uang", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha Banking yaitu: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir dan sebagainya.

Renting: kelompok wirausaha menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, seperti : penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

Brokering: kelompok wirausaha menjadi "lembaga perantara" yang

menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Contoh jenis usaha Brokering yaitu: jasa pembayaran listrik, PAM, telekomunikasi, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

Trading: kelompok wirausaha menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh jenis usaha Trading antara lain: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.

Holding: kelompok wirausaha sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh suatu manajemen tatakelola usaha tertentu (BUMDES, koperasi, usaha profesi, kelompok ekonomi, dan sejenisnya) agar tumbuh usaha bersama.

Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, *role playing* dan pendampingan untuk menginstitusionalisasi UMKM-UMKM yang ada agar menjadi lembaga mapan untuk menuju Desa Penuer.. Sasaran kegiatan ini adalah Pengurus Kelompok UMKM Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Target luaran kegiatan ini adalah artikel Jurnal Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hasil Pengabdian

Analisis Situasi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam hal ini, Pengabdian bertujuan untuk melakukan pendampingan dengan menginstitusionalisasi UMKM yang ada di Gari agar menjadi Lembaga yang baik dan terkoordinir dalam satu kelompok UMKM. Teori institusional (*Institutional Theory*) atau teori

kelembagaan core ideanya adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Bahwa ide atau gagasan pada lingkungan institusional yang membentuk bahasa dan simbol yang menjelaskan keberadaan organisasi dan diterima (taken for granted) sebagai norma-norma dalam konsep organisasi. Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan social. teori institusional digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai penjelas yang kuat dan populer, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, eksternal, social dan lingkungan. Dimana organisasi berada. Penyesuaian pada harapan eksternal atau harapan sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal.

Institutional theory merupakan salah satu teori yang banyak dipakai untuk memahami perilaku individu dan organisasi (Dacin, Goodstein, & Scott, 2002). Teori ini awalnya menjelaskan bagaimana struktur makna yang dilembagakan mempengaruhi proses dalam organisasi (Greenwood & Suddaby, 2006). Dalam perkembangannya, institutional theory terbagi dalam 2 kelompok pandangan yaitu old-institutional theory (OIT) dan new institutional theory (NIT). OIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi karena adanya nilai (values), norma (norms) dan perilaku (attitudes) yang bersifat taken-for-granted, sedangkan NIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi karena organisasi berfikir secara logis dengan mempertimbangkan classifications, routines, scripts, schema (Powell & DiMaggio, 1991).

Desa Preuner adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk menggeliatkan dinamika wirausaha ekonomi berbasis potensi maupun kearifan lokal, melalui unit usaha untuk dapat dikelola menjadi berkualitas global dengan penguatan kapasitas komunitas masyarakat secara berkelanjutan. Berikut sebaran Desa Preuner di DIY:

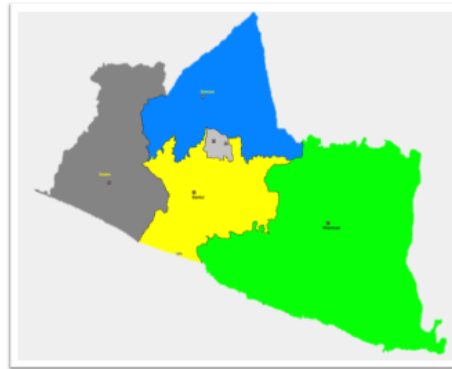
SEBARAN DESA PRENER DI Wilayah D.I. Yogyakarta

Wilayah Bantul	JUMLAH	%
Total DESA PRENER di Bantul	24	21*
Status Embrio	4	17
Status Penumbuhan	2	8
Status Pengembangan	3	13
Status Maju	15	63

Wilayah DIY	JUMLAH	%
Total DESA PRENER di DIY	115	100
Status Embrio	26	23
Status Penumbuhan	10	9
Status Pengembangan	22	19
Status Maju	57	49

Wilayah Sleman	JUMLAH	%
Total DESA PRENER di Sleman	27	23*
Status Embrio	5	19
Status Penumbuhan	1	4
Status Pengembangan	7	26
Status Maju	14	51

Wilayah Kulon Progo	JUMLAH	%
Total DESA PRENER di KP	18	16*
Status Embrio	4	22
Status Penumbuhan	1	6
Status Pengembangan	2	11
Status Maju	11	61



Wilayah Gunungkidul	JUMLAH	%
Total DESA PRENER di GK	24	21*
Status Embrio	6	18
Status Penumbuhan	4	12
Status Pengembangan	10	29
Status Maju	14	41

- Total desa prener pada awal 2025 sebanyak 115 desa
- Persebaran jumlah Terbanyak secara berurutan dimulai dari desa Maju, Embrio dan Pengembangan
- Total Desa dengan katagori maju sebanyak 57 desa. Jumlah terbanyak ada di Bantul (15), GK (14) & SImn (14)

* Faktor pembagiya total desa prener di DIY (115)

SEBARAN DESA PRENER DI GUNUNGKIDUL

No	Nama Kel/Desa	Kap & kabupaten	Status Desa	Model Pendampingan
1	Banaran	Playen Gunungkidul	Embrio	GZRT
2	Logandeng	Wonosari Gunungkidul	Embrio	-
3	Giricahyo	Purwosari Gunungkidul	Embrio	-
4	Ngeposari	Semanu Gunungkidul	Embrio	-
5	Piyaman	Wonosari Gunungkidul	Embrio	-
6	Kedungpoh	Nglipar Gunungkidul	Embrio	-
7	Semuah	Rongkop Gunungkidul	Penumbuhan	KASPAK
8	Pacarajo	Semanu Gunungkidul	Penumbuhan	KASPAK
9	Tancep	Ngawen Gunungkidul	Penumbuhan	KASPAK
10	Grogol	Paliyan Gunungkidul	Penumbuhan	Blangkun
11	Melikan	Rongkop Gunungkidul	Pengembangan	KASPAK
12	Kelor	Karangmojo Gunungkidul	Pengembangan	KASPAK
13	Bendung	Semin Gunungkidul	Pengembangan	KASPAK
14	Kepek	Saptosari Gunungkidul	Pengembangan	KASPAK
15	Semanu	Semanu Gunungkidul	Pengembangan	KASPAK



Wilayah Gunungkidul	JUMLAH	%
Total DESA PRENER di GK	34	30*
Status Embrio	6	18
Status Penumbuhan	4	12
Status Pengembangan	10	29
Status Maju	14	41

- Produk desa prener maju (Putat) : produk unggulan yang dikembangkan sudah menjadi sentra, tetapi masih stagnan
- Produk desa prener pengembangan (Giring) : produk yang dikembangkan masih belum jelas, kelembagaan masih belum kuat
- Produk desa prener pengembangan (Bunder) : produk jadi sudah ada (olahan coklat), ruang pemasaran belum ada
- Produk desa prener maju (Kemadang) : produk unggulan belum kuat karakternya, belum dipastikan kondisinya pasti dilepas
- Produk desa prener pengembangan (Katongan) : produk unggulan sudah ada (produk olahan lidah buaya), CSR/kemitraan sudah ada, hanya pemasaran yang sebenarnya harus dioptimalkan lagi,
- Produk desa prener maju (Ngalang) : produk unggulan cukup beragam (olahan pisang, batik), perlu ruang promosi yang lebih
- Produk desa prener maju (Bejiharjo) : produk unggulan cukup beragam, progress pasca dilepas belum bisa dipotret, perlu pendalaman

Potensi Kalurahan Gari dapat dikatakan cukup banyak dibidang Usaha dan UMKM, seperti digambarkan dibawah ini:

Padukuhan	Potensi UMKM
Gatak	-
Gondangrejo	Kerajinan Kendang, Kerajinan Batu, Pembuatan Emping Garut, Tari, Sambal Tawon, Kripik Bonggol.
Kalidadap	Sambel Cabok, Pijatan Tradisional, Potensi Air Kali Sumber.
Ngijorejo	Pembuatan Keris, Lukis Kaca, Lidah Buaya.
Gari	-
Jatirejo	-

Gelung	Pembuatan Alat Stick Drum, Situs Watu Dakon, Pembuatan Wayang Kulit.
Tegalrejo	Pembuatan Gamelan, Pembuatan Tempe, Pande Besi.
Ngelorejo	Pande Besi, Industri Alumunium.

Salah satu konsep yang dapat dipakai adalah One Village One Product. One Village Product One adalah sebuah gerakan usaha mencapai pembangunan regional di Jepang dengan cara mendorong komunitas lokal untuk memproduksi setidaknya satu produk yang dapat dipasarkan di lingkup lokal, domestik, maupun pasar internasional. Pada 1979, gerakan One Product One Village (OVOP) di Oita diusulkan oleh Dr. Morihiko Hiramatsu yang saat itu menjabat sebagai pemimpin daerah administrasi Oita (Shakya, 2011). Seperti halnya di Gari juga memiliki produk unggulan yakni, ukir batu putih seperti gambar dibawah ini:



Metode Pelaksanaan

No.	Materi	Capaian yang diharapkan	Waktu
1.	Pemetaan Kelompok UMKM	Memahami arti Institusi UKM dan Koordinasi antar UMKM Mengetahui manfaat sebagai modal Sosial dan Modal Ekonomi, serta Modal Budaya.	1 kali kegiatan pelatihan dan praktek

2.	Pemahaman tentang modal budaya perlu terinstitusionalisasi agar bisa berkembang dengan lembaga yang profesional.	Upaya membentuk mindset masyarakat bahwa kebudayaan menjadi upaya untuk memajukan desa melalui kelembagaan yang kuat.	1 kali kegiatan pelatihan dan praktek
3.	Pendampingan dalam pendaftaran ke Lurah Gari	memfasilitasi kelompok UMKM untuk merealisasikan mendapatkan SK Lurah dan mengkonsultasikan ke Dinas UMKM Gunungkidul	1 kali kegiatan dan praktek

Tim Pelaksana melakukan pada tiap tahapan dengan menggunakan prinsip bahwa setiap inovasi yang diterima oleh mitra merupakan proses, mendengar, mengetahui, mencoba, mengevaluasi, menerima, meyakini, dan melaksanakan. Melalui proses-proses tersebut diharapkan inovasi dapat diadopsi secara berkesinambungan, serta target sasaran mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis terhadap perkembangan kegiatannya serta mampu mengembangkan inovasi yang telah dikuasainya. Agar setiap proses berlangsung dengan baik, maka penyampaian inovasi kepada mitra ditempuh melalui tahapan penjelasan, diskusi, praktek serta dilakukan tahapan pendampingan.

Adapun tahapan metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. Pemetaan kelompok Budaya Kalurahan Gari

Di awal pelaksanaan PKM akan dilakukan pemetaan Kelompok UMKM di kalurahan Gari sesuai dengan kesamaan budaya yang masih aktif dan berkegiatan. Dari hasil pemetaan tersebut nantinya akan dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan jenis usaha. Pembagian kelompok ini dirasa cukup penting untuk kegiatan pelatihan supaya berlangsung efektif. Dalam satu kelompok bisa terdiri dari 8-10 orang atau perwakilan kelompok UMKM.

2. Pembuatan materi dalam kajian kelembagaan kelompok UMKM Gari

Dalam kegiatan semua potensi, masalah, kendala, tantangan, dan masukan akan diakumulasikan dan dicari pemecahan masalahnya. Materi Pemetaan, Pengembangan kelembagaan UMKM Gari untuk mengarahkan anggota kelompok agar terinstitusionalisasi dengan baik. Selain itu pemerintah supradesa juga dilibatkan dalam rangka melakukan konsultasi dan transfer pengetahuan.

3. Pendampingan, pemantauan dan pengarahan kegiatan

Pendampingan dan pemantauan dilakukan minimal 1 bulan sekali untuk

melihat progres implementasi ide pemetaan, pengembangan kelembagaan dan pendaftaran kelompok UMKM di kalurahan Gari ke Lurah Gari.

4. Evaluasi dan rencana tindak lanjut

Pada akhir kegiatan diadakan evaluasi dengan menyebarkan kuesioner untuk diisi pengelola Kelompok UMKM Kalurahan Gari. Dari hasil tersebut maka akan dibuat rencana tindak lanjut. Evaluasi diperlukan untuk menjadi langkah awal perbaikan dari kekurangan-kekurangan pada saat perencanaan dan pelaksanaan pengabdian. Pengabdian Desa Preuner melaksanakan FGD di Gari dengan Gambaran sebagai berikut:

Tahapan	Tahun ke-	Definisi	MATERI
UTAMA	Embrio/Penumbuhan	0/1 TAHAP EMBRIO dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan potensi wilayah Merupakan tahap awal, atau tahap pengenalan atau pendalaman terhadap potensi desa Tahap ini bisa dilakukan oleh OPD yang memiliki kompetensi dalam bidang pemberdayaan UMKM di lingkup kabupaten/kota atau tingkat provinsi Dilakukan sosialisasi sekaligus pemahaman tentang dinamika tatakelola wirausaha Sudah teridentifikasi potensi usaha dan tatakelola usaha (produksi, potensi pasar, dan kelembagaan)	Tahap penyusunan kajian identifikasi (khusus embrio) Sosialisasi konsep desa preneur dan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah Manajemen dasar untuk tatakelola kewirausahaan, yakni : manajemen perencanaan usaha, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen sumberdaya manusia, termasuk : leadership Kapasitas dan kualitas produk yang diminati pasar dan jeli terhadap peluang pasar Karakter pasar potensial yang akan menjadi sasaran
	Pengembangan	2 Merupakan tahap pengembangan usaha melalui manajemen pemasaran dan strategi usaha yang efektif	Manajemen pemasaran : sistem pemasaran yang baik Daya tarik produk : branding, merek, daya saing, sertifikasi, cara promosi/pengembangan digitalisasi usaha
	Maju	3 merupakan tahap lanjut yang diorientasikan pada promosi usaha dan perluasan	Pengembangan mitra dan jejaring bisnis Pelaksanaan pameran usaha

			jejaring/kemitraan	
LANJUT	Pelepasan	4 atau 5	Tidak ada intervensi sama sekali	
	Evaluasi/Pembinaan	5 atau 6	Pembinaan pasca tahun ke-4/5 untuk mengetahui dampak usaha terhadap perekonomian wilayah/desa dan keberlanjutan usaha untuk dilakukan kebijakan selanjutnya	

Pendekatan sistematis dalam mendampingi UMKM Kalurahan Gari menuju Desa Preneur menjadi langkah awal pengabdian dengan mempertimbangkan kondisi atau tahapan desa preneur. Tahapan dimulai dengan pemetaan kelompok UMKM berbasis kesamaan budaya dan jenis usaha untuk efektivitas pelatihan. Selanjutnya, disusun materi kajian kelembagaan yang mengidentifikasi potensi, kendala, dan strategi penguatan institusional. Pendampingan dilakukan rutin setiap bulan, diikuti post-test untuk mengukur capaian. Evaluasi akhir menggunakan kuesioner menjadi dasar rencana tindak lanjut. Metode ini selaras dengan tahapan perkembangan Desa Preneur: *Embrio* (pemetaan dan sosialisasi), *Pengembangan* (strategi pemasaran dan branding), *Maju* (jejaring dan promosi), hingga *Evaluasi*. Keterlibatan pemerintah supradesa memperkuat transfer pengetahuan dan legitimasi program. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hasil akhir berupa SK Desa Preneur, tetapi juga membangun kapasitas berkelanjutan bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Berikut hasil pengabdian yang dilakukan oleh tim di Kalurahan Gari:

No	Kegiatan / Langkah	Capaian / Output	Keterangan / Dampak
1	Pemetaan UMKM di 8 padukuhan	Teridentifikasi 492 UMKM aktif dengan beragam bidang usaha	Data terstruktur untuk perencanaan penguatan dan promosi
2	Pendaftaran UMKM di Aplikasi SIBAKUL DIY	492 UMKM terdaftar resmi di platform	Memperluas akses pasar digital, memudahkan promosi produk
3	Penyusunan Kajian Kelembagaan UMKM	Dokumen kajian berisi potensi, kendala, strategi, dan roadmap	Menjadi dasar argumentasi pengajuan SK Desa Preneur
4	Pendampingan Administrasi & Pembuatan Proposal	Proposal resmi pengajuan SK Desa Preneur	Diajukan ke Lurah dan direkomendasikan ke Dinas

			Koperasi & UMKM Gunungkidul
5	FGD & Pelatihan Manajemen Usaha	Pengurus UMKM memahami manajemen keuangan, pemasaran, branding terutama produk unggulan Kalurahan Gari	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan daya saing produk unggulan
6	Konsultasi dengan Dinas Koperasi & UMKM	Mendapat masukan teknis dan prosedural	Memastikan kelengkapan berkas dan kesesuaian regulasi

Peran Mitra

Pemerintah Kalurahan berperan strategis sebagai pengarah, fasilitator, dan penghubung dalam proses menuju Desa Preneur. Sebagai pengarah, pemerintah menetapkan visi, misi, dan prioritas pembangunan ekonomi desa yang selaras dengan konsep kewirausahaan berbasis potensi lokal. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan dukungan berupa pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, dan bantuan sarana prasarana seperti ruang pameran, pusat informasi, dan infrastruktur digital. Peran sebagai penghubung dijalankan dengan membangun jejaring kemitraan—baik dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, maupun pihak swasta—untuk memperluas pasar dan sumber pembiayaan. Pemerintah kalurahan juga memastikan regulasi dan SOP kelembagaan mendukung iklim usaha yang berkelanjutan dan inklusif.

Kendala Pelaksanaan Pengabdian

Kendala pengabdian di Kalurahan Gari dalam pengajuan sebagai Desa Preneur terkait erat dengan aspek kelembagaan. Struktur organisasi desa dan kelompok UMKM belum sepenuhnya efektif dalam mengelola program ekonomi, terutama karena peran dan fungsi masing-masing pihak belum terdistribusi jelas. Kelembagaan ekonomi seperti BUMDes atau koperasi belum optimal dalam menjadi penggerak usaha bersama, sehingga koordinasi lintas pelaku terbatas. Selain itu, kapasitas pengurus dalam administrasi, penyusunan proposal, dan pengelolaan keuangan masih rendah. Minimnya regulasi internal dan SOP membuat proses pengambilan keputusan tidak konsisten. Akibatnya, dukungan kelembagaan yang seharusnya memperkuat pengajuan Desa Preneur belum berfungsi maksimal.

Kesimpulan

Pengabdian di Kalurahan Gari menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan UMKM menjadi kunci utama menuju penetapan sebagai Desa Preneur. Melalui pemetaan potensi di

delapan padukuhan, teridentifikasi 492 UMKM yang kemudian terdaftar di aplikasi SIBAKUL DIY, membuka akses pasar digital. Penyusunan kajian kelembagaan dan pendampingan administrasi berhasil menghasilkan proposal resmi untuk pengajuan SK Desa Preneur yang direkomendasikan ke Dinas Koperasi dan UMKM Gunungkidul. FGD dan pelatihan manajemen usaha meningkatkan kapasitas pengurus dalam keuangan, pemasaran, dan branding. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait kelembagaan yang belum optimal, koordinasi lintas pelaku yang terbatas, rendahnya kapasitas manajerial, dan minimnya regulasi internal. Keterlibatan aktif pemerintah kalurahan terbukti strategis sebagai pengarah, fasilitator, dan penghubung jejaring kemitraan. Program ini menegaskan perlunya tindak lanjut berupa penguatan struktur kelembagaan, penetapan SOP, serta pengembangan jejaring untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM berbasis potensi lokal.

A. REKOMENDASI PENGABDIAN SELANJUTNYA

- i. Membuat Proposal untuk mendaftarkan ke Gari Preuner
- ii. Mengidentifikasi Jenis Desa Preuner yang akan di daftarkan (berbasis UMKM yang Aktif)

A. Pendahuluan.

1. Latar belakang.

B. Dasar Hukum

1. UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
2. UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM
3. UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta
4. UU No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani
5. PP no 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kab/kota
6. Pergub D.I.Y no 56 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas fungsi dan tata kerja, Dinas koperasi dan UKM D.I.Yogyakarta.
7. Perda kab Sleman No 56 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka panjang kab sleman 2000-2025
8. Perda kab sleman no 2 tahun 2020 tentang penetapan kelurahan.

C. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud Kegiatan
- b. Tujuan Kegiatan

D. Sasaran

E. Data kondisi

F. Program/ Kegiatan yang Di usulkan

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB) *terlampir*

H. Penutup

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami sekiranya bapak/ibu berkenan menindaklanjuti/ merealisasikan permohonan kami ini, atas perhatiannya serta terlaksananya permohonan ini mengucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Dacin, M. T., Goodstein, J., & Scott, W. R. (2002). Institutional theory and institutional change: introduction to the special research forum. *The Academy of Management Journal*, 45(1), 44– 55.

Greenwood, R., & Suddaby, R. (2006). Institutional entrepreneurship in mature fields: the big

JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

EISSN: 2745-875X, Vol. 6 No.4 (2025): Community Empowerment Hal: 364-378

DOI: <https://doi.org/10.55314/jcoment.v6i4.1099>

five accounting firms. *The Academy of Management Journal*, 49(1), 27–48.

Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (1991). *The new institutionalism in organizational analysis*. Chicago, USA: The University of Chicago Press

Scott, W. R. (1995). *Institutions and organizations*. California, USA: Sage Publications, Inc

Shakya, M. (2011). *OVOP and OTOP for community development: Lessons from a decentralized approach to economic development*. Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya